

STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MEMAKSIMALKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Abraham Obed Heselo

NPP. 32.1034

Asdaf Kabupaten Yahukimo , Provinsi Papua Pegunungan

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.1034@Praja.IPDN.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Papua Pegunungan Province, as a newly established autonomous region (Daerah Otonomi Baru – DOB), faces complex challenges in regional financial management. These include limited budget resources, low-quality human resources, and weak transparency and accountability. The research gap lies in the lack of studies highlighting the use of information technology—specifically the Financial Management Information System (FMIS)—as an adaptive financial management strategy in new autonomous regions such as Papua Pegunungan. Previous studies have predominantly focused on conventional aspects of fiscal performance and administrative constraints.* **Purpose:** *This study aims to describe the implementation of government strategies in budget management to accelerate development in the newly autonomous region of Papua Pegunungan Province.* **Method:** *The study employs a qualitative descriptive method using an inductive approach. Data collection techniques include semi-structured interviews with five informants and documentation in the form of photos and videos taken using a smartphone.* **Result:** *The findings reveal that the budget management strategy implemented by the Regional Government of Papua Pegunungan Province is carried out systematically through the stages of planning, organizing, directing, and controlling. The government prioritizes the education, health, and infrastructure sectors, in line with the allocation of special autonomy funds. One of the key findings is the adoption of the Financial Management Information System (FMIS), a financial information system that facilitates more effective, transparent, and accountable budget management. FMIS has been shown to improve the performance of regional financial management and reduce budget misuse, particularly within the Regional Revenue, Financial Management, and Asset Agency (BPPKAD).* **Conclusion:** *The implementation of FMIS has had a positive impact on regional financial management in Papua Pegunungan Province, as it supports the achievement of transparency and accountability principles while strengthening sustainable budget governance.*

Keywords: *Development Acceleration, New Autonomous Region, Development Strategy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) menghadapi permasalahan kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang rendah, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian yang menyoroti pemanfaatan teknologi informasi, khususnya Financial Management Information System (FMIS), sebagai strategi pengelolaan keuangan yang adaptif di Daerah Otonomi Baru seperti Provinsi Papua Pegunungan, sementara studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek kinerja fiskal dan kendala administratif secara konvensional. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengelolaan anggaran untuk percepatan pembangunan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Pegunungan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dengan lima informan, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dan video dengan menggunakan smartphone. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pemerintah juga menetapkan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama sesuai dengan alokasi dana otonomi khusus. Salah satu temuan penting adalah penerapan Financial Management Information System (FMIS), yaitu sistem informasi keuangan yang mempermudah pengelolaan anggaran secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. FMIS terbukti berperan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan meminimalisir kesalahan penggunaan anggaran, khususnya di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD). **Kesimpulan:** penerapan FMIS memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua Pegunungan, karena mampu mendukung pencapaian prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat tata kelola anggaran secara berkelanjutan.

Kata kunci: Percepatan Pembangunan, Daerah Otonomi Baru, Strategi Pembangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Pembentukan provinsi ini dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pengangkatan harkat serta martabat Orang Asli Papua, khususnya di delapan kabupaten yang menjadi wilayah administratifnya. Sebagai DOB, Papua Pegunungan memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyesuaian wilayah administratif ini berdampak langsung terhadap perencanaan dokumen strategis seperti RPJPD 2025–2045, yang harus merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Namun, Papua Pegunungan menghadapi berbagai tantangan

besar, seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, hingga lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah umumnya disebabkan oleh kurangnya kompetensi teknis dan lemahnya sistem pengawasan internal, terutama di daerah baru dan daerah tertinggal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Pegunungan bersama Pemerintah Pusat mengadakan Rapat Koordinasi Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemahaman aparatur serta mempercepat pelaksanaan APBD. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kapabilitas aparatur dalam memahami regulasi dan menjalankan prinsip good governance.

Tahun anggaran 2023 dan 2024, Papua Pegunungan menerima alokasi dana cukup besar, termasuk Dana Otonomi Khusus, DAU, dan DAK, yang difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, besarnya dana tersebut harus diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Provinsi Papua Pegunungan sebagai DOB. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan kebijakan, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola fiskal yang berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian pengelolaan keuangan daerah terutama terletak pada kurangnya fokus terhadap strategi berbasis digital dalam konteks Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan seperti Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek kinerja fiskal melalui indikator kuantitatif seperti rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi, serta kendala administratif dan birokrasi dalam pelaporan anggaran. Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting, belum banyak yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana inovasi teknologi informasi seperti Financial Management Information System (FMIS) dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di DOB.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah di wilayah-wilayah otonomi baru (DOB) maupun daerah yang telah lama berdiri menunjukkan pendekatan dan fokus yang beragam. Jumati et al. (2023) meneliti kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayawijaya dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rasio desentralisasi, efektivitas PAD, dan belanja pembangunan, yang menunjukkan ketergantungan fiskal tinggi namun alokasi belanja pembangunan cenderung meningkat. Sementara itu, Habel Frasawi et al. (2021) mengkaji pengelolaan Dana Otonomi Khusus (DOK) di Kabupaten Sorong melalui studi kualitatif, dan menemukan bahwa birokrasi dan keterlambatan pelaporan menjadi hambatan utama dalam efektivitas pengelolaan dana, meskipun mekanismenya telah sesuai peraturan. Ndraha dan Uang (2018) menyoroti strategi pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Nganjuk, yang lebih banyak terserap untuk belanja pegawai, menunjukkan masih rendahnya efisiensi fiskal. Hefir et al. (2024) melalui kajian di Provinsi Kepulauan Riau menemukan bahwa keberhasilan atau kegagalan DOB sangat dipengaruhi oleh kesiapan administratif, partisipasi masyarakat, dan kemandirian fiskal. Sedangkan penelitian Aida dan

Sudarman (2022) yang mengkaji pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Studi tersebut menunjukkan bahwa dana otonomi khusus difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, namun belum menyentuh aspek inovasi pengelolaan anggaran secara digital.. Semua studi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan di daerah sangat ditentukan oleh kombinasi antara kapasitas internal pemerintah daerah dan dukungan regulasi serta teknologi yang tepat guna..

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui sorotan khusus pada implementasi *Financial Management Information System (FMIS)* sebagai pendekatan sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada analisis rasio fiskal atau permasalahan struktural seperti keterlambatan pelaporan dan ketergantungan fiskal, penelitian ini menawarkan pendekatan berbasis teknologi sebagai solusi konkret terhadap berbagai persoalan manajerial dan kelembagaan di DOB.

FMIS diposisikan bukan hanya sebagai alat bantu administratif, tetapi sebagai kerangka sistemik yang memungkinkan integrasi antarunit kerja, efisiensi proses anggaran, pengawasan berbasis data, serta peningkatan transparansi yang dapat diakses secara real-time. Dalam konteks Papua Pegunungan, FMIS menjadi jawaban atas tantangan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), karena sistem ini menyederhanakan proses dan mengurangi risiko kesalahan manual. Selain itu, kompleksitas administratif yang kerap terjadi di daerah baru juga dapat diminimalisasi karena FMIS menyediakan struktur kerja yang baku dan otomatis.

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada posisi FMIS sebagai instrumen strategis dalam mendorong *good governance* di DOB melalui transformasi digital. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tentang manajemen keuangan daerah, tetapi juga memberikan manfaat praktis berupa model penguatan kapasitas kelembagaan daerah yang berbasis teknologi yang sejauh ini masih jarang dikaji secara spesifik di konteks DOB wilayah timur Indonesia.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengelolaan anggaran untuk percepatan pembangunan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Pegunungan. Dengan mendapatkan gambaran pelaksanaan strategi pengelolaan anggaran pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang telah diambil, kendala yang dihadapi, serta peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif menurut Sugiyono (2019). Alasan pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam strategi pengelolaan anggaran dalam percepatan pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan fenomena sosial kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menggali makna dan persepsi informan secara mendalam dalam konteks alamiah. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan proses, kebijakan, dan strategi yang diterapkan oleh BPPKAD secara sistematis, sedangkan pendekatan induktif digunakan karena penelitian ini dimulai dari data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan, lalu dianalisis dan

dikaitkan dengan teori yang relevan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan (2011), bahwa pendekatan induktif menekankan pada pengolahan informasi lapangan sebagai dasar kesimpulan, yang menjadikan hasil penelitian lebih kontekstual dan bertanggung jawab secara analitik.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan purposive sampling Sugiyono (2019), yaitu peneliti memilih individu yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran serta proses percepatan pembangunan DOB. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari lima orang yang memiliki jabatan strategis di BPPKAD Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Kepala BPPKAD, Sekretaris BPPKAD, Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, dan Subkoordinator Dukungan Teknis Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan. Kelima informan ini dipilih karena memiliki wawasan, otoritas, dan pengalaman langsung terhadap implementasi kebijakan pengelolaan anggaran serta perannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di wilayah DOB. Kepala BPPKAD sebagai informan kunci karena beliau bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah serta memiliki pemahaman menyeluruh atas kebijakan strategis yang diterapkan.

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu Januari 2025 hingga Februari 2025 di kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Pegunungan yang berlokasi di Jalan Diponegoro 01, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat administrasi dan pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan serta relevan dengan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Anggaran untuk percepatan Pembangunan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Pegunungan.

Pengelolaan anggaran di Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru melibatkan proses perencanaan yang sistematis, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi dengan OPD, meskipun terkendala oleh faktor teknis seperti jaringan internet. Efisiensi menjadi kunci, di mana program seperti FMIS diimplementasikan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan transparansi. Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi pendukung seperti BPPKAD memiliki struktur yang masih dalam tahap penyempurnaan, dengan pembagian tugas yang disesuaikan kemampuan pegawai. Sistem pengendalian internal diterapkan untuk menjamin pencapaian sasaran organisasi, sementara efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan pada aspek SDM dan infrastruktur. Pengarahan dilakukan untuk memastikan adaptasi terhadap perubahan kebijakan pusat dan meningkatkan responsivitas penggunaan anggaran. Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dari proses, melalui forum partisipatif guna menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal. Seluruh proses ini mendukung tujuan utama yaitu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan.

3.2. Dinamika Pengelolaan Anggaran di Daerah Otonomi Baru

Pengelolaan anggaran di Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Provinsi Papua Pegunungan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat berperan sebagai pendorong maupun penghambat. Di satu sisi, terdapat berbagai faktor pendukung yang mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu faktor utama adalah dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana-dana ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah yang baru terbentuk, sehingga mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, keberadaan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi seperti Financial Management Information System (FMIS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) turut memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Fokus anggaran yang diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tak kalah penting, komitmen pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi regulasi keuangan dan mempercepat realisasi APBD menjadi faktor internal yang menguatkan sistem pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

Namun demikian, pengelolaan anggaran di DOB juga menghadapi berbagai tantangan yang bersifat menghambat. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbatasan ini berimplikasi pada lambatnya penyerapan anggaran serta kurang optimalnya pelaksanaan program-program prioritas. Selain itu, infrastruktur dasar dan teknologi yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil, menyulitkan proses monitoring dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Risiko terjadinya korupsi juga menjadi salah satu faktor penghambat serius, terutama karena lemahnya sistem pengawasan internal dan terbatasnya peran inspektorat daerah. Akibatnya, celah untuk penyimpangan anggaran masih terbuka lebar dan dapat mengancam akuntabilitas pemerintah daerah. Terakhir, tingginya ketergantungan DOB terhadap dana dari pemerintah pusat juga menjadi persoalan struktural. Minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat daerah menjadi sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional yang dapat berdampak langsung pada ketersediaan anggaran untuk program pembangunan

3.3. Analisis SWOT

Analisis strategi pengelolaan anggaran untuk percepatan pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Pegunungan, teori SWOT digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan pertama yang dimiliki oleh Provinsi Papua Pegunungan adalah adanya dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Undang-undang ini memberikan legitimasi penuh kepada daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan. Keberadaan dasar hukum ini bukan hanya memperjelas kewenangan, tetapi juga memperkuat posisi pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan berdasarkan skala prioritas lokal. Artinya, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan

arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

Kekuatan kedua adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Praktik partisipatif ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi sosial terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Pelibatan masyarakat memungkinkan pemerintah untuk menyerap aspirasi secara langsung, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan diterima oleh publik. Selain itu, partisipasi ini juga mendorong terbentuknya budaya pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dari kedua kekuatan ini, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan memiliki fondasi yang cukup kuat dalam aspek kelembagaan dan sosial-politik untuk mengelola anggaran secara efektif. Hal ini menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah otonomi baru yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka, pemanfaatan kekuatan ini harus diiringi dengan perencanaan strategis yang matang dan sistem pengawasan yang ketat agar dana yang dialokasikan benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Kelemahan (weaknesses)

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan daerah termasuk kelemahan utama yang harus segera diatasi. Status sebagai daerah otonomi baru membuat struktur birokrasi dan kualitas SDM belum sepenuhnya siap menjalankan fungsi teknis yang kompleks dalam pengelolaan anggaran. Kualitas aparatur yang rendah menyebabkan berbagai kendala, mulai dari perencanaan yang tidak matang, hingga pelaksanaan anggaran yang kurang efektif, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan.

Di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), kondisi ini terlihat dari banyaknya kekosongan posisi strategis yang seharusnya diisi oleh tenaga profesional dengan kompetensi teknis yang kuat. Kekosongan tersebut menyebabkan beban kerja tidak merata dan proses administrasi keuangan menjadi terhambat. Ketidaklengkapan struktur organisasi juga menurunkan efektivitas pengawasan internal dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Lemahnya sumber daya manusia dan belum optimalnya pengisian jabatan esensial menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan secara tepat waktu dan berkualitas.

Upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, perekrutan tenaga ahli, dan penataan kelembagaan secara profesional sangat diperlukan agar kelemahan internal ini tidak terus menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan. Tanpa pembenahan menyeluruh di aspek kelembagaan dan kapasitas personel, potensi dari kekuatan hukum serta dukungan partisipatif masyarakat tidak akan maksimal dalam mendorong kemajuan Provinsi Papua Pegunungan.

3. Peluang (Opportunities)

Pengelolaan anggaran di Provinsi Papua Pegunungan, aspek peluang (*opportunities*) menunjukkan adanya potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Otonomi khusus yang diberikan kepada daerah ini membuka ruang pengelolaan anggaran yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Keberadaan dana otonomi khusus (OTSUS) memberikan tambahan sumber daya keuangan yang signifikan, yang dapat digunakan untuk pembangunan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dana ini tidak hanya

menambah kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan fiskal yang sesuai dengan konteks lokal, baik dari segi budaya, geografis, maupun sosial ekonomi. Kondisi ini memberikan peluang untuk menyesuaikan program pembangunan secara tepat sasaran. Di samping itu, dana otonomi khusus juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan.

Penggunaan *Financial Management Information System* (FMIS) turut memperkuat peluang ini. Sistem ini menawarkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan anggaran, peningkatan transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Otomatisasi pencatatan transaksi mengurangi celah penyimpangan dan mempercepat proses administrasi, sementara integrasi sistem keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kendali yang lebih baik terhadap alokasi dan realisasi anggaran. FMIS juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia karena mendorong aparatur untuk lebih memahami sistem digital dan strategi pengelolaan keuangan yang modern. Melalui peluang ini, pemerintah daerah memiliki dasar kuat untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Ancaman (theats)

Analisis SWOT terhadap pengelolaan anggaran di Provinsi Papua Pegunungan, aspek ancaman (*threats*) mencerminkan faktor eksternal yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan daerah. Ketidakkonsistenan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi salah satu ancaman serius yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan program anggaran di daerah. Perubahan mendadak dalam kebijakan fiskal atau peraturan pengelolaan dana sering kali menimbulkan ketidakpastian, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran di tingkat daerah.

Ketergantungan terhadap kebijakan pusat membuat pemerintah daerah berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi atau penyesuaian kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Gangguan ini tidak hanya berisiko menunda pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga dapat mengacaukan skala prioritas penggunaan anggaran yang telah dirancang secara matang. Ketidakstabilan dalam pengelolaan anggaran turut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama jika target pembangunan tidak tercapai akibat hambatan kebijakan dari pusat.

Kondisi ini mempertegas pentingnya penguatan kelembagaan dan kapasitas adaptif pemerintah daerah. Ketahanan terhadap perubahan kebijakan harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan anggaran yang berkelanjutan. Dengan demikian, ancaman eksternal seperti kebijakan yang tidak konsisten dapat diantisipasi melalui peningkatan kemampuan daerah dalam menyusun rencana yang fleksibel, serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat untuk menjaga sinergi dalam pembangunan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan anggaran untuk percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan ditopang oleh kerangka legal yang kuat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta pemanfaatan teknologi digital seperti FMIS dan SIPD untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih

menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur dasar yang belum memadai, lemahnya pengawasan internal, serta ketergantungan tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat.

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya. Pandie (2018) menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi masyarakat mendorong pembentukan DOB, namun pembangunan sering terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan kapasitas birokrasi. Fikri (2021) menggarisbawahi pengaruh besar dinamika kepentingan aktor lokal dan belum optimalnya kesiapan kelembagaan terhadap keberhasilan implementasi DOB di Papua Tengah. Sementara itu, Azikin (2018) menyoroti terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah akibat dominasi kebijakan pusat dan lemahnya kapasitas fiskal. Heri et al. (2021) menekankan pentingnya inovasi teknologi dan tata kelola dalam pelayanan publik DOB, sedangkan Indra (2023) menyoroti peran dinamika politik dan kebijakan pusat dalam menentukan harmonisasi wilayah baru. Studi Becha et al. (2025) juga memperkuat bahwa inklusi keuangan digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan regional.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan anggaran DOB bukan hanya bergantung pada dukungan dana pusat, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi, dan sinergi kebijakan pusat-daerah secara berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik lainnya yang layak didiskusikan lebih lanjut. Salah satunya adalah kesenjangan antara desain kelembagaan yang telah dirancang, seperti pembentukan BPPKAD, dengan kapasitas nyata pelaksana di lapangan. Kekosongan jabatan strategis dan minimnya kompetensi teknis aparatur menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan kurang optimal. Selain itu, meskipun Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi instrumen fiskal yang penting untuk memperkuat manuver kebijakan daerah, pemanfaatannya belum maksimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan teknis. Hal ini diperparah oleh ketidakseimbangan struktur fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah, menciptakan kerentanan fiskal jangka panjang. Di sisi lain, kemajuan melalui adopsi sistem digital seperti FMIS dan SIPD memang meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun tantangan infrastruktur teknologi seperti keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil menjadi hambatan serius terhadap implementasi sistem digital secara merata. Terakhir, meskipun keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran telah dilakukan secara formal melalui forum-forum partisipatif, partisipasi tersebut cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya substantif dalam memengaruhi arah kebijakan dan alokasi anggaran. Temuan-temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran DOB membutuhkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya fokus pada instrumen teknis dan regulatif, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya, kemandirian fiskal, dan pemberdayaan aktor lokal secara substansial.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Financial Management Information System (FMIS) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua Pegunungan karena mampu mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat tata kelola anggaran secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan strategi pengelolaan anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Papua Pegunungan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam konteks perencanaan, pemerintah telah menyusun program-program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang didukung oleh alokasi dana otonomi khusus. FMIS menjadi instrumen penting dalam setiap tahapan tersebut karena tidak hanya menyediakan kemudahan teknis dalam proses pencatatan dan pelaporan anggaran, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan internal, khususnya di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD). Dengan meminimalkan risiko kesalahan dalam penggunaan anggaran dan meningkatkan efisiensi kerja, FMIS berperan sebagai fondasi dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, integrasi FMIS dalam strategi pengelolaan anggaran tidak hanya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, tetapi juga menjamin keberlangsungan prinsip good governance di tingkat lokal..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah informan yang diwawancarai terbatas hanya pada lima orang, sehingga pandangan yang diperoleh mungkin belum mewakili seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Pegunungan. Kedua, metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan pada gambaran dan interpretasi tanpa adanya pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas strategi pengelolaan anggaran maupun penerapan Financial Management Information System (FMIS). Ketiga, fokus penelitian yang hanya pada satu daerah, yaitu Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru, membuat temuan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, data dokumentasi yang digunakan terbatas pada pengambilan foto dan video menggunakan smartphone, sehingga mungkin kurang mendalam dan komprehensif dibandingkan dengan data pendukung lainnya. Terakhir, penelitian ini belum menggali secara mendalam tantangan atau kendala yang dihadapi selama implementasi FMIS dan strategi pengelolaan keuangan, sehingga aspek tersebut dapat menjadi fokus kajian lebih lanjut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi dengan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dan beragam agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan valid mengenai efektivitas penerapan strategi pengelolaan anggaran dan Financial Management Information System (FMIS). Penelitian masa depan juga dapat memperluas cakupan studi ke daerah otonomi baru lainnya untuk melihat perbedaan dan kesamaan strategi pengelolaan keuangan, sehingga hasilnya dapat lebih digeneralisasi. Selanjutnya, kajian lebih mendalam mengenai hambatan, tantangan, dan solusi dalam implementasi FMIS serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan anggaran di daerah otonomi baru sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi dokumentasi dan analisis data yang lebih canggih untuk mendukung validitas dan reliabilitas temuan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), atas izin, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh informan yang bersedia memberikan waktu dan informasi yang sangat berharga selama proses pengumpulan data. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran serta kesuksesan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua Pegunungan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N., and S. Sudarman. 2022. "Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Kabupaten Aceh Barat." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ...* 9:373–78. doi: <https://dx.doi.org/10.25157/dak.v9i3.8523>.
- Azikin, Andi. 2018. "Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5(1):35–41. <https://core.ac.uk/download/pdf/481313152.pdf>
- Becha, Hamdi, Maha Kalai, Saifeddine Houidi, and Kamel Helali. 2025. "Digital Financial Inclusion, Environmental Sustainability and Regional Economic Growth in China: Insights from a Panel Threshold Model." *Journal of Economic Structures* 14(1). doi: 10.1186/s40008-025-00347-4.
- Fikri, M. Cahyadi, and Kurniawan Teguh. 2021. "Analisis Implementasi Kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13(2):1–24. <https://d1wqtxtslxzle7.cloudfront.net/>
- Habel Frasawi, Jusuf, Jantje Tinangon, and Jessy D. L. Warongan. 2021. "Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kabupaten Sorong." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"* 12(2):2021. doi: <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.37427>.
- Hasan, Erlina. 2011. *Filsafat Ilmu: Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hefir, Syaihidina, Indah Utami, Muhammad Nursyawal, Muhammad Aidil Zulfa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Universitas Maritim, and Raja Ali. 2024. "Kegagalan Dan Keberhasilan Pasca Proses Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau." doi: <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.337>.
- Heri, H., M. R. Caesar, M. Zakaria, D. Suhendar, A. Sulaeman, T. Alamsyah, M. D. Yusuf, E. Nuryani, G. Undang, and I. Sumardi. 2021. "Innovation of Village Governance Based on Technology 4.0: Case Study in the New Otonom District." *Journal of Physics: Conference Series* 1869(1):0–5. doi: 10.1088/1742-6596/1869/1/012096.
- Indra, M. 2023. "Indonesia's Plan for Concurrent Regional Expansion." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1181(1). doi: 10.1088/1755-1315/1181/1/012020.
- Jumati, Jutisma Buchary Akbar, Nur Fadila Nacikit, and Kumba Digdowiseiso. 2023. "Jumati at Al." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4 (1) (2023)." 4(1):167–75. doi: <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.562>.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Ndraha, Ayler Beniah, and Dedy Pribadi Uang. 2018. "Strategi Pengalokasian Dana Alokasi Umum Dalam Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur." *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 5(2):129–44. doi: <https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.418>.

Pandie, Prima M. Rinaldo. 2018. "Feasibility Study For New Local Government In East-CentralSouth Regency East-South East Province Prima Maryos." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 10(2):101–11. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/275/356>

